

ANALISIS PERTUMBUHAN EKONOMI DI KARESIDENAN SEMARANG ERA DESENTRALISASI FISKAL

Amin Pujiati

Universitas Negeri Semarang

E-mail:

Abstract

Every regions government must be able increasing their own regional income. The finance of resources in fiscal decentralization era, such as: regional original income, general allocation funds and natural resources revenue sharing and tax revenue sharing

This research aims to analyze the fiscal decentralization impact to economic growth at regional district in sub provinsi Semarang. The tools of analisis is regression using panel data with Generalized Least Square (GLS) method and Fixed Effect model. It uses district-level data and supplied by the Indonesian Central Bureau of Statistics during 2002 - 2006

The regression result shows that regional income, natural resources revenue sharing and tax revenue sharing, and labour forces have positive impact on economic growth at regional district in sub provinsi Semarang. General allocation funds has negative effect towards economic growth at regional district in sub provinsi Semarang. Fiscal decentralization brings more advantages for regions to manage their own fiscal capacities. The regions governments must be have informational advantages concerning resource allocation with optimal

Keywords: *Fiscal Decentralization, economic growth, Fixed Effect Model*

PENDAHULUAN

Penerapan otonomi daerah yang luas saat ini bertujuan untuk mengembangkan seluruh potensi ekonomi yang ada sehingga dapat memacu peningkatan aktivitas perekonomian di daerah yang pada akhirnya meningkatkan perekonomian nasional. Penerapan otonomi daerah yang telah digariskan dalam UU No. 33/2004, mensyaratkan adanya suatu keseimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah adalah suatu sistem pembiayaan pemerintah dalam rangka negara kesatuan yang mencakup pembagian keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, serta pemerataan antar

daerah secara proporsional, adil, demokratis dan transparan.

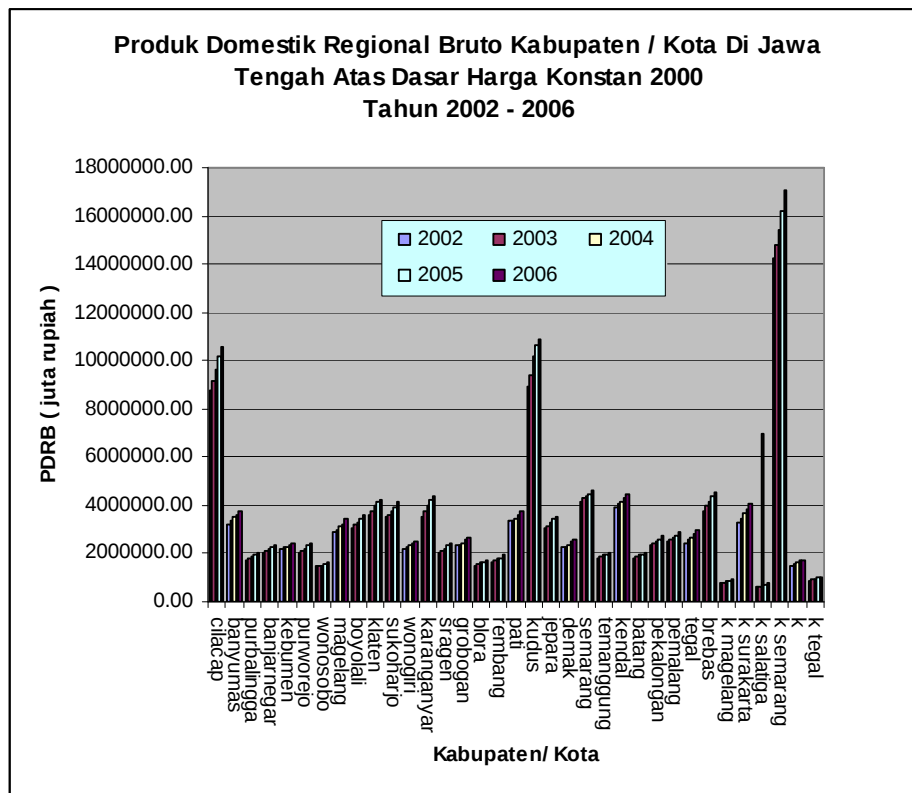
Desentralisasi fiskal tidak akan berguna jika tidak diikuti dengan kemampuan finansial yang cukup memadai oleh pemerintah daerah. Oleh karena itu melalui UU No. 33/2004, diharapkan nantinya akan dapat menyelesaikan permasalahan tersebut. Sumber penerimaan daerah yang digunakan untuk pendanaan pemerintah daerah menurut UU No. 33/2004 dalam pelaksanaan desentralisasi meliputi: Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH), pinjaman daerah dan lain-lain penerimaan yang sah. Dalam UU. No 33/2004

memberikan kewenangan bagi daerah untuk meningkatkan kemampuan pendapatannya, yaitu dengan meluaskan jangkauan dari bagian pajak dan bagi hasil sumber daya alam dengan pemerintah pusat.

Pemerintah daerah harus dapat meningkatkan penerimaannya untuk membiayai kegiatan pembangunan, namun di era desentralisasi fiskal harapan itu belum optimal yang tercermin dalam pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Pertumbuhan PDRB riil menunjukkan variasi antar daerah di Jawa Tengah setelah pelaksanaan desentralisasi fiskal.

Pada gambar 1 bisa dilihat bahwa pada kurun waktu 2002 – 2006 belum semua

kabupaten/kota di Jawa Tengah menunjukkan kinerja ekonomi yang baik. Dari tahun 2002 – 2006 di mana era pelaksanaan desentralisasi fiskal yang sudah dimulai dari tahun 2001, ternyata hanya kabupaten-kabupaten tertentu yang memiliki PDRB tinggi yaitu: Kabupaten Cilacap, kabupaten Kudus, Kabupaten Semarang dan Kota Semarang. Hal ini menunjukkan bahwa era desentralisasi fiskal di mana daerah diberi kewenangan dalam mengatur keuangan daerahnya ternyata banyak kabupaten/kota yang belum menunjukkan perubahan yang signifikan dalam PDRB-nya. Meskipun PDRB bukan satu-satunya indikator dalam pembangunan.



Sumber: BPS, 2007

Gambar 1

Tabel 1: Gini Ratio Per Karesidenan Di Jawa Tengah Tahun 2002 – 2006

Karesidenan	Rata -Rata
Banyumas	0,2351
Kedu	0,2426
Surakarta	0,2485
Pati	0,2039
Semarang	0,2532
Pekalongan	0,2301

Sumber: BPS, 2007

Dengan kondisi laju pertumbuhan ekonomi yang sangat bervariasi antar daerah setelah pelaksanaan desentralisasi fiskal dan belum seperti yang diharapkan, disinyalir terjadi peningkatan ketimpangan yang cukup besar antara Kabupaten/Kota pada Provinsi Jawa Tengah. Propinsi Jawa Tengah apabila di bagi menurut wilayah karesidenan terdiri dari enam karesidenan yaitu karesidenan Banyumas, karesidenan Kedu, karesidenan Surakarta, karesidenan Pati, karesidenan Semarang dan karesidenan Pekalongan. Dilihat antar wilayah karesidenan di propinsi Jawa Tengah juga menunjukkan adanya ketimpangan. Pada Tabel 1 di atas dapat dilihat ketimpangan antar karesidenan dengan menggunakan Gini Ratio. Ketimpangan terbesar terjadi di Karesidenan Semarang.

Dengan melihat gambaran kondisi setelah pelaksanaan desentralisasi fiskal, dapat diketahui bahwa daerah belum mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara signifikan dan masih ada kesenjangan antar daerah di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah meskipun daerah diberikan sumber pendanaan yang lebih besar dan keleluasaan yang luas untuk mengelola sesuai dengan keinginan atau kebutuhan. Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengestimasi pengaruh variabel keuangan daerah (Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH) terhadap

pertumbuhan ekonomi di Kabupaten/Kota di wilayah Karesidenan Semarang serta untuk mengestimasi pengaruh tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten/Kota di wilayah Karesidenan Semarang.

REVIEW PENELITIAN SEBELUMNYA

Waluyo, Joko (2007) telah melakukan penelitian tentang dampak desentralisasi terhadap pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pendapatan antardaerah di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah model ekonometrika persamaan simultan dengan menggunakan data panel antar propinsi tahun 2001 – 2005, dengan teknik estimasi Two Stage Least Square (TSLS). Hasil yang didapat menunjukkan bahwa desentralisasi fiskal berdampak meningkatkan pertumbuhan ekonomi relatif lebih tinggi di daerah pusat bisnis dan daerah yang kaya sumber daya alam daripada daerah bukan pusat bisnis dan miskin sumber daya alam. Mekanisme transfer dana PKPD selama ini (UU No. 33 tahun 2000) lebih menguntungkan bagi daerah yang kaya sumber daya alam melalui mekanisme bagi hasil SDA. Alokasi dana bagi hasil SDA untuk investasi sektor kunci dalam perekonomian akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah. Mekanisme DBHP lebih menguntungkan daerah kota yang merupakan pusat bisnis dan industri, karena basis pajak daerahnya lebih tinggi. Sedangkan daerah-daerah yang miskin SDA dan bukan pusat bisnis dan industri mengandalkan penerimaan daerahnya dari DAU, dan DAK. Di samping itu desentralisasi fiskal akan berdampak mengurangi ketimpangan pendapatan antardaerah terutama antara daerah-daerah di Pulau Jawa dengan Luar Pulau Jawa dan Antara Kawasan Barat Indonesia (KBI) dengan Kawasan Timur Indonesia (KTI). Hal ini disebabkan oleh mekanisme equalizing transfer melalui dana PKPD akan

mengurangi pembangunan yang bersifat jawa sentris. Tidak banyaknya SDA (Minyak, gas, dan kehutanan) yang terdapat di Pulau Jawa berdampak terhadap penerimaan dana bagi hasil SDA Pulau Jawa relatif lebih kecil daripada daerah kaya SDA di luar Pulau Jawa. Walaupun diimbangi dengan lebih baiknya penerimaan dana bagi hasil pajak dan adanya DAU, dan DAK.

Priyo Hari, Adi (2006) telah melakukan penelitian mengenai hubungan antara pertumbuhan ekonomi daerah, belanja pembangunan dan pendapatan asli daerah di Kabupaten/Kota se Jawa-Bali. Data yang digunakan dalam analisisnya adalah data APBD realisasi pemerintah kabupaten dan kota tahun 1998 – 2003. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi daerah mempunyai dampak yang signifikan terhadap peningkatan PAD. Namun pertumbuhan ekonomi pemda kabupaten dan kota masih kecil, akibatnya penerimaan PAD-nya kecil. Terkait dengan PAD, penerimaan yang menjadi andalan adalah retribusi dan pajak daerah. Tingginya retribusi bisa jadi merupakan indikasi semakin tingginya itikad pemerintah untuk memberikan layanan publik yang lebih berkualitas. Belanja pembangunan diarahkan pada sektor yang langsung dinikmati oleh publik. Belanja pembangunan memberikan dampak yang positif dan signifikan terhadap PAD maupun pertumbuhan ekonomi.

Sasana, Hadi (2005) telah melakukan penelitian mengenai dampak pelaksanaan desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten/Kota Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Alat analisis yang digunakan Pooled least Square (PLS) dengan rentang waktu 2001 – 2003. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa PAD mempunyai hubungan yang positif dan berpengaruh secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi hanya di Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta. Dana alokasi umum berpengaruh secara negatif dan

signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di kabupaten Bantul, kabupaten sleman, kabupaten Gunung Kidul dan Kota Yogyakarta. Peranan tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi adalah positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di seluruh kabupaten/kota Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. DAU tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di kabupaten/kota Provinsi Yogyakarta

Dari sisi otoritas moneter, terjadinya mekanisme transfer keuangan pusat-daerah berpotensi menimbulkan permasalahan dalam operasi pengendalian moneter. Terjadinya desentralisasi fiskal berpotensi menimbulkan resiko perubahan perilaku pengendalian fiskal di daerah-daerah. Jika pemerintah daerah mengalokasikan dananya untuk memperkuat fondasi perekonomian daerah maka akan berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Tetapi jika dana transfer tersebut dialokasikan untuk kegiatan-kegiatan yang tidak produktif, spekulatif dan konsumtif yang dapat menimbulkan *idle money* maka akan berdampak terhadap pengendalian moneter (terutama tentang jumlah uang beredar) (Ismail; 2002). Hasil ini mendukung temuan sebelumnya di China bahwa desentralisasi ekonomi akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, tetapi bersifat *inflationary* (Brandt dan Zhu, 2000).

Abdullah dan Halim (2003) telah melakukan penelitian tentang pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap belanja pemerintah daerah. Studi kasus yang dilakukan di Kabupaten/Kota di Jawa dan Bali. Hasil temuannya adalah sebagai berikut DAU dan PAD berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah

Penelitian L. Jay Helms (1985) dengan menggunakan data panel lintas negara menunjukkan bahwa kenaikan pajak pusat dan pajak daerah berdampak memperlambat pertumbuhan ekonomi daerah,

jika penerimaan pajak digunakan sebagai dana perimbangan pusat-daerah. Hasil penelitian ini juga mengindikasikan bahwa pemanfaatan dana perimbangan untuk penyediaan barang publik akan berdampak terhadap kualitas barang publik lokal. Kesimpulan yang didapat menunjukkan bahwa pemberian insentif dana perimbangan berdasarkan pengeluaran lebih baik daripada berdasarkan penerimaan pajak.

LANDASAN TEORI Pertumbuhan Ekonomi

Menurut Todaro (2000) terdapat tiga faktor atau komponen utama dalam pertumbuhan ekonomi dari setiap bangsa, ketiganya adalah: Akumulasi modal yang meliputi semua bentuk atau jenis investasi baru yang ditanamkan pada tanah, peralatan fisik dan modal atau sumber daya manusia, Pertumbuhan penduduk beberapa tahun selanjutnya yang akan memperbanyak jumlah akumulasi kapital, kemajuan teknologi

Model pertumbuhan neoklasik dipelopori oleh Robert M. Solow pada tahun 1950-an. Model pertumbuhan ini telah diterapkan dalam berbagai studi empiris di banyak negara. Asumsi dasar yang dipakai dalam model ini antara lain, keluaran dihasilkan dari penggunaan dua jenis masukan yaitu modal dan tenaga kerja, perekonomian berada pada kondisi penggunaan tenaga kerja penuh, perekonomian berada dalam kondisi persaingan sempurna.

Ada dua hal utama yang dibahas dalam model ini, yaitu peranan modal dan perubahan teknologi dalam pertumbuhan ekonomi. Namun untuk sementara perubahan teknologi dianggap konstan sehingga akan diketahui bagaimana peran modal dalam proses pertumbuhan. Akumulasi modal dan kedalaman modal terjadi pada saat pertumbuhan persediaan (*stock*) modal lebih cepat daripada pertumbuhan tenaga kerja. Dalam kondisi

tanpa perubahan teknologi, akumulasi modal akan mendorong pertumbuhan keluaran per tenaga kerja, meningkatkan *marginal product* tenaga kerja serta meningkatkan upah. Namun akumulasi modal juga akan mendorong berkurangnya pengembalian modal (*return of capital*) dan menurunkan tingkat suku bunga riil.

Desentralisasi Fiskal

Desentralisasi merupakan bagian dari strategi setiap institusi yang berkehendak untuk tidak mati dalam persaingan global. Ia adalah strategi untuk menjadi kompetitif. Demikian pula bagi sebuah negara. Desentralisasi menjadikannya terbagi menjadi bagian-bagian kecil yang terintegrasi dan menjadi sebuah "makhluk organik" yang bergerak efisien mengatasi tantangan global. Dalam praktik, desentralisasi dan otonomi bersifat tumpang tindih. Namun, dalam makna keduanya memiliki perbedaan. Desentralisasi merupakan sistem pengelolaan yang berkelebihan dengan sentralisasi. Jika sentralisasi adalah pemusatan pengelolaan, maka desentralisasi adalah pembagian dan pelimpahan. Rondinelli dan Cheema (dikutip Sarundajang, 1999). Desentralisasi adalah "*the transfer of planning, decision making, or administrative authority from the central government to its field organizations, local administrative units, semi-autonomous and parastatal organizations*".

Menurut Prawirosetoto (2002), Desentralisasi fiskal adalah pendelegasian tanggung jawab dan pembagian kekuasaan dan kewenangan untuk pengambilan keputusan di bidang fiskal yang meliputi aspek penerimaan (*tax assignment*) maupun aspek pengeluaran (*expenditure assignment*). Desentralisasi fiskal ini dikaitkan dengan tugas dan fungsi pemerintah daerah dalam penyediaan barang dan jasa publik (*public goods/public service*).

Desentralisasi fiskal merupakan inti dari desentralisasi itu sendiri karena pemberian kewenangan di bidang politik maupun administrasi tanpa dibarengi dengan desentralisasi fiskal merupakan desentralisasi yang sia-sia, sebab untuk dapat melaksanakan kewenangan dan tanggung jawab serta tugas-tugas pelayanan publik tanpa diberi wewenang di dalam penerimaan maupun pengeluaran desentralisasi fiskal tidak akan efektif. Dengan demikian, desentralisasi fiskal akan memberi keleluasaan kepada daerah untuk menggali potensi daerah dan memperoleh transfer dari pusat dalam kerangka keseimbangan fiskal. Terdapat beberapa alasan untuk mempunyai sistem pemerintahan yang terdesentralisasi (Simanjuntak, 2001): (1) Representasi demokrasi, untuk memastikan hak seluruh warga negara untuk berpartisipasi secara langsung pada keputusan yang akan mempengaruhi daerah atau wilayah (2) Tidak dapat dipraktekkannya pembuatan keputusan yang tersentralisasi, adalah tidak realistis pada pemerintahan yang sentralistik untuk membuat keputusan mengenai semua pelayanan rakyat seluruh negara, terutama pada negara yang berpenduduk besar seperti Indonesia (3) Pengetahuan lokal (*lokal knowledge*), mereka yang berada pada daerah lokal mempunyai pengetahuan yang lebih banyak mengenai kebutuhan lokal, prioritas, kondisi, dll (4) Mobilitas sumber daya, mobilitas pada bantuan dan sumber daya dapat di fasilitasi dengan hubungan yang lebih erat di antara populasi dan pembuatan kebijakan pada tingkat lokal.

Menurut Dilliger, dalam Sidik, (2002), pada dasarnya terdapat empat jenis desentralisasi, yaitu: Desentralisasi politik (*political decentralization*), yaitu pemberian hak kepada warga Negara melalui perwakilan yang dipilih suatu kekuasaan yang kuat untuk mengambil keputusan publik, desentralisasi administrative (*administrative decentralization*), yaitu pelimpahan wewe-

ng guna mendistribusikan wewenang, tanggung jawab dan sumber-sumber keuangan untuk menyediakan pelayanan public, terutama yang menyangkut perencanaan, pendanaan dan manajemen fungsi-fungsi pemerintahan dari pemerintah pusat kepada aparat di daerah, badan otoritas tertentu atau perusahaan tertentu, Desentralisasi fiskal (*fiscal decentralization*) yaitu pelimpahan wewenang dalam mengelola sumber-sumber keuangan, yang mencakup: a) *Self-financing* atau *cost recovery* dalam pelayanan publik terutama melalui pengenaan retribusi daerah b) *Cofinancing* atau *coproduction*, di mana pengguna jasa berpartisipasi dalam bentuk pembayaran jasa atau kontribusi tenaga kerja c) Transfer dari pemerintah pusat terutama berasal dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), sumbangan darurat, serta pinjaman daerah (sumber daya alam) dan Desentralisasi ekonomi (*economic or market decentralization*), yaitu kebijakan tentang privatisasi dan deregulasi yang intinya berhubungan dengan kebijakan pelimpahan fungsi-fungsi pelayanan masyarakat dari pemerintah kepada sektor swasta sejalan dengan kebijakan liberalisasi

METODE PENELITIAN

Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang bersumber pada laporan Badan Pusat Statistik khususnya data tahun 2002 sampai dengan tahun 2006. Data utama yang diperlukan adalah semua variabel yang diteliti meliputi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Tenaga Kerja. Jenis data yang digunakan adalah data Panel yaitu gabungan *Time series* dan *Cross Section*. Data *Time series* dari tahun 2002 – 2006. Obyeknya adalah 6 kabupaten/kota di wilayah Karesidenan Semarang Yaitu: Kota

Semarang, Kota Salatiga, Kabupaten Semarang, Kabupaten Kendal, Kabupaten Demak dan kabupaten Grobogan.

Definisi Operasional Variabel

Definisi operasional variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah (1) Pendapatan Asli Daerah yang terdiri dari hasil pajak daerah, retribusi daerah, pendapatan dari laba perusahaan daerah, dan lain-lain pendapatan yang sah (2) Pertumbuhan Ekonomi diproksi dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menurut dasar harga konstan tahun 2000 (3) Dana Bagi Hasil adalah bagian dari dana perimbangan untuk mengatasi ketimpangan vertikal yang dilakukan melalui pembagian hasil antara pemerintah pusat dan daerah penghasil, dari sebagian penerimaan perpajakan (nasional) dan penerimaan sumber daya alam (4) Dana Alokasi Umum merupakan transfer yang bersifat umum (*block grant*) untuk mengatasi ketimpangan horizontal dengan tujuan utama pemerataan kemampuan keuangan antar daerah (5) Tenaga Kerja adalah jumlah penduduk yang berusia 10 tahun keatas yang bekerja selama seminggu yang lalu.

Alat Analisis

Teknik penaksiran model

Untuk mengestimasi pengaruh PAD, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Tenaga Kerja terhadap pertumbuhan ekonomi digunakan alat analisis regresi dengan model data panel. Ada dua pendekatan mendasar yang digunakan dalam menganalisis panel data. Pertama, pendekatan *Fixed Effects* dan Pendekatan kedua, adalah *Random Effects*. Sebelum model diestimasi dengan model yang tepat, terlebih dahulu dilakukan uji spesifikasi apakah *Fixed Effects* atau *Random Effects* atau keduanya memberikan hasil yang sama. Pilihan antara *Fixed Effects* dan *Random*

Effects ditentukan dengan menggunakan uji *goodness of fit*. Untuk pendekatan *Fixed Effects* atau *common* menggunakan uji F statistik. Adapun uji F test yang dilakukan adalah sebagai berikut:

$$F(n-1, nT-n-K) = \frac{(R^2_u - R^2_p)/(n-1)}{(1-R^2_u)/(nT-n-K)}$$

di mana: u = *unrestricted model*, p = *restricted model*, n = jumlah unit *cross-section*, T = jumlah unit waktu dan K = jumlah parameter yang diestimasi (Green, 2000: 562). Jika ternyata hasil perhitungan uji $F \geq F(n-1, nT-n-K)$ ini berarti H_0 ditolak, artinya intersep untuk semua unit *cross sections* tidak sama. Dalam hal ini, akan digunakan *Fixed Effects* model untuk mengestimasi persamaan regresi.

Metode GLS (*Generalized Least Squares*) dipilih dalam penelitian ini karena adanya nilai lebih yang dimiliki oleh GLS dibandingkan OLS dalam mengestimasi parameter regresi. Gujarati (2003) menyebutkan bahwa metode OLS yang umum tidak mengasumsikan bahwa varians variabel adalah heterogen, pada kenyataannya variasi data pada data pooling cenderung heterogen. Metode GLS sudah memperhitungkan heterogenitas yang terdapat pada variabel independent secara eksplisit sehingga metode ini mampu menghasilkan estimator yang memenuhi kriteria BLUE (*best linear unbiased estimator*).

Model analisis

Model yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$Q_t = A K_t^\alpha L_t^\beta \dots\dots\dots (2)$$

Dengan asumsi A (teknologi) diasumsikan sebagai variabel eksogen PAD, DBH, DAU = K dan TK = L serta PDRB = Q, Maka persamaan (1) dapat diformulasikan menjadi:

$$Y = f(\text{PAD}, \text{DBH}, \text{DAU}, \text{TK}). \dots\dots\dots(3)$$

Dari persamaan (1) dan (2) maka diperoleh:
 $\text{PDRB} = A \text{ PAD}^{\alpha_1} \text{DAU}^{\alpha_2} \text{DBH}^{\alpha_3} \text{TK}^{\alpha_4} \dots\dots\dots(4)$

Untuk menggunakan model empiris linear dari persamaan (3) diturunkan dengan menggunakan log, sehingga diperoleh persamaan sebagai berikut:

$$\text{LY}_t = \alpha_0 + \alpha_1 \text{LPAD} + \alpha_2 \text{LDBH} + \alpha_3 \text{LDAU} + \alpha_4 \text{LTK} + e_t \dots\dots\dots(5)$$

Di mana:

LY = Produk Domestik Regional Bruto

LDBH = Dana Bagi Hasil

LPAD = Pendapatan Asli Daerah

LDAU = Dana Alokasi Umum

LTK = Tenaga Kerja

α_0 = Konstanta

$\alpha_1 - \alpha_4$ = Koefisien parameter

e_t = *Disturbance error*

Uji asumsi klasik

Uji asumsi klasik yang dilakukan dalam penelitian ini adalah Uji Multikolinearitas, Uji Heteroskedastisitas dan Uji Autokorelasi

PEMBAHASAN HASIL

Hasil Regresi

Uji spesifikasi model

Untuk mengestimasi apakah Pendapatan Asli daerah (PAD), Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Tenaga Kerja (TK) berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi (Produk Domestik Regional Bruto/PDRB), maka terlebih dahulu dilakukan uji spesifikasi model yang digunakan dengan menggunakan uji F. Uji F pada dasarnya membandingkan antara model *common* yang mengasumsikan intersep untuk semua unit *cross section* sama dengan model *Fixed Effect* yang mengasumsikan intersep berbeda antar unit *cross section*. Sedangkan untuk memilih *Fixed Effect* atau *Random Effect* menggunakan pengujian dilihat dari

goodness of fitnya. Hasil uji signifikansi F secara lengkap bisa dilihat pada lampiran 1.

Hasil uji signifikansi F yang dirangkum dari lampiran 1, dapat disimpulkan bahwa hasil F_{hit} sebesar 14,2340 dan F_{tabel} dengan $\alpha = 0,05$ karena $F_{hit} > F_{tabel}$, maka signifikan yang berarti model yang dipakai untuk mengestimasi pengaruh pelaksanaan desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di karesidenan Semarang adalah *Fixed Effect*.

Hasil estimasi

Tabel 3 berikut ini menyajikan ringkasan hasil estimasi model yang dipakai (*fixed effect*) dengan jumlah observasi 30 yang diolah dengan menggunakan Eviews 3.1. Hasil regresi selengkapnya (*common*, *fixed effect*, *random effect*) bisa dilihat pada lampiran 2 – 4. Dengan membandingkan hasil estimasi pengaruh pelaksanaan desentralisasi fiskal kabupaten/kota di karesidenan Semarang dari tiga model yang berbeda, dilihat dari *goodness of fitnya* (R^2 , t statistik, F statistik) maka yang dipilih sebagai model adalah model *Fixed effect*. Adapun persamaannya sebagai berikut:

LPDRB_GROBOGAN

$$= 2753687 + 0.007323 \text{LPAD} \\ + 0.164632 \text{LDBH} - 0.001289 \text{LDAU} \\ + 0.766495 \text{LTK}$$

LPDRB_DEMAK

$$= 218999.7 + 0.007323 \text{LPAD} \\ + 0.164632 \text{LDBH} - 0.001289 \text{LDAU} \\ + 0.766495 \text{LTK}$$

LPDRB_SEMARANG

$$= 27569.48 + 0.007323 \text{LPAD} \\ + 0.164632 \text{LDBH} - 0.001289 \text{LDAU} \\ + 0.766495 \text{LTK}$$

LPDRB_KENDAL

$$= 1121296. + 0.007323 \text{LPAD} \\ + 0.164632 \text{LDBH} - 0.001289 \text{LDAU} \\ + 0.766495 \text{LTK}$$

LPDRB_KSALATIGA

$$= 225563.0 + 0.007323 \text{ LPAD} \\ + 0.164632 \text{ LDBH} - 0.001289 \text{ LDAU} \\ + 0.766495 \text{ LTK}$$

LPDRB_KSEMARANG

$$= 128562.8 + 0.007323 \text{ LPAD} \\ + 0.164632 \text{ LDBH} - 0.001289 \text{ LDAU} \\ + 0.766495 \text{ LTK}$$

Pembahasan

Berdasarkan hasil estimasi, Pendapatan Asli Daerah (PAD) menunjukkan tanda positif dan signifikan secara statistik pada derajat kepercayaan 1 persen untuk semua kabupaten/kota. Hasil ini konsisten dengan hasil penelitian Sasana (2005), Adi (2006), Saragih (2003) dan Bappenas (2003) dan Lin dan Liu (2000). Saragih (2003) menyatakan bahwa pertumbuhan PAD merupakan eksekusi dari pertumbuhan ekonomi. Sependapat dengan ini Bappenas (2003) menegaskan bahwa pertumbuhan PAD seharusnya sensitif terhadap kenaikan PDRB, artinya setiap terjadi kenaikan PDRB akan memberikan dampak positif terhadap kenaikan PAD.

Selama ini pemerintah-pemerintah daerah (kabupaten dan kota) bisa dikatakan keliru dalam memaknai desentralisasi fiskal. Tidak efektifnya berbagai perundangan baru yang dikeluarkan menunjukkan tidak sensitifnya pemerintah terhadap berbagai kekuatan lokal yang dimiliki. Seharusnya pemerintah mampu mengimbangi berbagai produk baru tersebut dengan pengembangan potensi ekonomi lokal, misal dengan memberikan peluang yang lebih luas kepada investor. Dibutuhkan kepekaan yang tinggi terhadap berbagai kebutuhan investor untuk meningkatkan aktivitas investasi ini. Tingginya aktivitas ini akan memberikan tambahan penerimaan daerah setempat (Lin dan Liu (2000), Saragih (2003), dan Bappenas (2003). Koefisien PAD sebesar 0,01 yang berarti apabila ada peningkatan PAD sebesar 10 persen pertumbuhan

ekonomi (PDRB) akan meningkat 0,1 persen.

Dana Bagi Hasil (DBH) menunjukkan tanda yang positif dan signifikan secara statistik pada derajat kepercayaan 1 persen untuk semua kabupaten/kota. Hal ini konsisten dengan hasil penelitian Sasana (2005). Hasil yang demikian mengindikasikan bahwa kabupaten/kota di karesidenan Semarang dapat mengoptimalkan perolehan dana bagi hasil untuk kepentingan pembangunan daerah. Koefisien DBH sebesar 0,16 yang berarti apabila ada peningkatan DBH sebesar 10 persen, maka pertumbuhan ekonomi (PDRB) akan meningkat 1,6 persen.

Dana Alokasi Umum (DAU) menunjukkan tanda yang negatif dan signifikan secara statistik pada derajat kepercayaan 1 persen untuk semua kabupaten/kota. Dana Alokasi Umum (DAU) di kabupaten/kota di karesidenan Semarang besarnya rata-rata sekitar 60,5 persen dari penerimaan APBD. Hal ini bisa dikatakan mayoritas kabupaten/kota menggantungkan pembiayaan daerahnya dari DAU. Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian dari Sasana (2005), dengan hasil tanda yang negatif untuk pengaruh DAU terhadap pertumbuhan ekonomi (PDRB), berarti pemerintah daerah di era desentralisasi masih kurang dapat menetapkan skala prioritas pembangunan daerahnya secara optimal atas sektor-sektor pembangunan yang memberikan efek multiplier luas terhadap perekonomian masyarakat. Selain itu masih relatif besarnya tingkat kebocoran yang terjadi, sehingga pengaruh Dana Alokasi Umum menjadi negatif terhadap pertumbuhan ekonomi (Sasana, 2005).

Tenaga kerja (TK) memainkan peran yang penting dalam penelitian ini, dengan melihat angka koefisiennya yang besar. Koefisien tenaga kerja menunjukkan tanda yang positif dan signifikan secara statistik pada tingkat kepercayaan 1 persen untuk

semua kabupaten/kota. Koefisien tenaga kerja yang besar ini belum bisa dikatakan adanya peningkatan kualitas tenaga kerja tetapi hanya dari sisi kuantitas. Hal ini bisa dilihat dari penduduk yang berumur 10 tahun keatas menurut pendidikan tertinggi yang ditamatkan rata-rata dari kabupaten/kota di karesidenan Semarang sebagian besar adalah tingkat SD, yaitu sebesar 70 persen kecuali kota Salatiga dan Kota Semarang rata-rata 40 persen, meskipun apabila dilihat dari jumlah jam kerja seminggu bagi yang bekerja lebih dari 35 jam/minggu rata-rata 67 persen untuk semua kabupaten/kota pada tahun 2005. Nilai koefisien tenaga kerja 0,76 artinya jika ada peningkatan tenaga kerja sebesar 10 persen akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi (PDRB) sebesar 7,6 persen. Jumlah tenaga kerja yang lebih besar diharapkan akan menambah jumlah tenaga yang produktif yang memacu pertumbuhan ekonomi.

Uji penyimpangan asumsi klasik untuk Multikolinearitas dilakukan dengan pendeteksian atas nilai R^2 dan signifikansi dari variabel yang digunakan. *Rule of Thumb* mengatakan apabila didapatkan R^2 yang tinggi sementara terdapat sebageian besar atau semua variabel yang secara parsial tidak signifikan, maka diduga terjadi multikolinearitas pada model tersebut (Gujarati, 2003). Lebih dari itu, multikolinearitas biasanya terjadi pada estimasi yang menggunakan data runtut waktu. Dengan mengkombinasikan data *time series* dengan data *cross section* mengakibatkan masalah multikolinearitas secara teknis dapat dikurangi. Penelitian ini menggunakan data panel, jadi sebenarnya secara teknis sudah dapat dikatakan masalah multikolinearitas sudah tidak ada. Hal tersebut diperkuat dengan hasil estimasi model semua variabel yang digunakan signifikan dan nilai R^2 yang tinggi, sehingga

dengan sendirinya model ini sudah terbebas dari multikolinearitas.

Uji Heteroskedastisitas, masalah ini muncul bersumber terutama dari variasi data *cross section* yang digunakan. Metode GLS (*Generalized Least Squares*) yang pada intinya memberikan pembobotan kepada variasi data yang digunakan, dengan kuadrat varians dari model. Fasilitas yang ada di program Eviews dengan memilih *cross section weight* dan *White Heteroscedasticity Covarians* maka masalah heteroskedastisitas sudah dapat diatasi.

Uji Autokorelasi, yang paling sederhana adalah menggunakan uji *Durbin Watson* (DW). Sebagai *rule of thumb* nilai DW hitung yang mendekati 2 dianggap menunjukkan bahwa model terbebas dari autokorelitas (Gujarati, 2003). Dari hasil estimasi diketahui *Durbin Watson* (DW) statistik sebesar 2,100. Kalau berpedoman pada *rule of thumb* sebenarnya sudah bisa dikatakan bahwa model terbebas dari autokorelasi. Untuk lebih meyakinkan bisa membandingkan antara DW statistik dengan DW tabel. Nilai d_l dan d_u dengan jumlah variabel bebas 4 dan N sebesar 30 adalah masing-masing 1,143 dan 1,739, maka keputusan untuk mengatakan bahwa model terbebas dari masalah autokorelasi apabila $d_u < d < 4 - d_u$ ($1,739 < 2,100 < 2,261$) bisa diterima. Hal ini berarti model sudah terbebas dari masalah autokorelasi.

PENUTUP

Simpulan

Hasil esimasi regresi pengaruh pelaksanaan desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi di kabupaten/kota di karesidenan Semarang adalah sebagai berikut: Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Peningkatan PAD yang dianggap sebagai modal, secara akumulasi akan lebih banyak menimbulkan eksternalitas yang bersifat positif dan akan

mempercepat pertumbuhan ekonomi, dana Hasil Bagi (DBH) berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Pengoptimalan perolehan Dana Bagi Hasil yang dianggap sebagai modal bagi kepentingan pembangunan daerah akan mempercepat pertumbuhan ekonomi, dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Temuan ini tidak mendukung teori pertumbuhan Neo Klasik yang beranggapan bahwa modal akan mempercepat pertumbuhan. Hal ini membuktikan meskipun ada keleluasaan dalam mengelola keuangan daerah, daerah belum dapat menetapkan skala prioritas pembangunan daerah secara optimal atas sektor-sektor pembangunan. Penetapan skala prioritas pembangunan akan memberikan efek multiplier terhadap perekonomian masyarakat, sehingga dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi, tenaga kerja (TK) sebagai faktor penting mempercepat pertumbuhan ekonomi mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Jumlah tenaga kerja yang lebih besar berarti akan menam-

bah jumlah tenaga produktif. Bertambahnya tenaga produktif akan meningkatkan output sehingga memacu pertumbuhan ekonomi.

Implikasi Kebijakan

Implikasi kebijakan dalam penelitian ini adalah Pendapatan Asli daerah (PAD) berdasarkan hasil penelitian koefisiennya kecil, sehingga perlu adanya upaya peningkatan PAD melalui optimalisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi. Adapun retribusi yang belum optimal antara lain retribusi tempat penitipan anak, retribusi pengelolaan limbah cair. Disamping itu peningkatan efisiensi administrasi dan menekan biaya pemungutan perlu dilakukan dengan pelayanan satu atap (*one stop service*), perlu memperhatikan produk-produk unggulan daerah masing-masing atau sektor-sektor yang menghasilkan *multiplier effect* bagi pertumbuhan ekonomi sehingga pelaksanaan desentralisasi fiskal yang berarti punya kewenangan dalam mengatur keuangan daerah dapat berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, S dan Halim, A, (2003). "Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja Pemerintah Daerah; Studi Kasus Kabupaten/Kota di Jawa dan Bali", *Simposium Nasional Akuntansi*. Surabaya.
- Adi, Priyo Hari, (2006). "Hubungan Antara Pertumbuhan Ekonomi Daerah, Belanja Pembangunan dan Pendapatan Asli daerah (Studi Kasus kabupaten dan Kota se Jawa- Bali)", *Simposium Nasional Akuntansi*. Padang.
- Baltagi, Badi, H., (2001). *Econometric Analysis of Panel data*, John Wiley & Sons, LTD, New York.
- Bappenas, (2003). Peta Kemampuan Keuangan Propinsi Dalam Era Otonomi Daerah: Tinjauan Atas Kinerja PAD dan Upaya yang dilakukan Daerah. Direktorat Pengembangan Otonomi daerah.
- Biro Pusat Statistik, (2004). *Statistik Keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kabupaten/Kota Tahun 2001 – 2003*.
- _____, *Jawa Tengah Dalam Angka*, 2001- 2006.
- _____, *Grobogan Dalam Angka*, 2001 – 2006.

- _____, *Demak Dalam Angka*, 2001 – 2006.
- _____, *Kendal Dalam Angka*, 2001 – 2006.
- _____, *Semarang Dalam Angka*, 2001 – 2006.
- _____, *Kota Salatiga Dalam Angka*, 2001 – 2006.
- _____, *Kota Semarang Dalam Angka*, 2001 – 2006.
- Green, William, H., (2000). *Econometric Analysis*, Prentice-Hall, Inc, New York.
- Gujarati, D., (2003). *Basic Econometrics*, Mc Graw Hill, inc, New York.
- Hanafi, Mamduh M. dan Halim, Abdul, (2001). *Analisis Laporan Keuangan*, UPP AMP YKPN, Yogyakarta.
- Himpunan peraturan Perundang-undangan, *Petunjuk dan Pelaksanaan Dana Perimbangan Dan Pengelolaan Keuangan Daerah*, 2006, Fokusmedia, Bandung.
- KPPOD, (2002). *Daya Tarik Investasi Kabupaten/Kota di Indonesia: Persepsi Dunia Usaha*.
- Lin, Justin Yifu dan Zhiqiang Liu, (2000). *Fiscal Decentralization and Economic Growth in China. Economic Development and Cultural Change*. Chicago. Vol 49. Hal: 1- 21.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 Tentang *Pedoman pengelolaan Keuangan daerah*, 2007, PT Buku Kita, Jakarta.
- Prawirosetoto, Yuwonono, (2002). “Desentralisasi Fiskal di Indonesia”, *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, Vol. 2 Agustus, Jakarta : Unika Atmajaya.
- Saragih, Juli Panglima, (2003). *Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah Dalam Otonomi*. Penerbit Ghalia Indonesia.
- Sasana, Hadi, (2005). “Analisis Dampak Pelaksanaan Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kesenjangan Antar Wilayah, antar Sektor di Kabupaten/Kota Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta”, *Jurnal Bisnis dan Ekonomi* Vol.12 No.2, September 2005.
- Simanjuntak, Robert, (2001). *Decentralization and Local Autonomy*. www.worldbank.org/wbi/publicfinance/document/ASEM/brodjonegoro.pdf.
- Sidik, Machfud, (2002). *Optimalisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Meningkatkan Kemampuan Keuangan Daerah*. Wisuda Angkatan XXI STIA LAN Tahun Akademik 2001-2002. Orasi Ilmiah.
- Suparmoko, (2002). *Ekonomi Publik Untuk Keuangan & Pembangunan Daerah*, Andi Offset, Yogyakarta.
- Todaro, Michael, P., (2000). *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*, Alih Bahasa Indonesia: Burhanudin Abdullah dan Harris Munandar.
- Widodo, Tri, (2006). *Perencanaan Pembangunan: Aplikasi Komputer (Era Otonomi Daerah)*, UPP STIM YKPN, Yogyakarta.

Waluyo, Joko, (2007). *Dampak Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Ketimpangan Pendapatan Antardaerah Di Indonesia*, Parallel Session 1A: Fiscal Decentralization 12 Desember 2007, Wisma Makara, Kampus UI – Depok.

Lampiran 1: Uji F Statistik

$$\begin{aligned}
 F(n-1, nT-n-K) &= \frac{(R_u^2 - R_p^2) / (n-1)}{(1 - R_u^2) / (nT-n-K)} \\
 F(5,0) &= \frac{(0,997155 - 0,976907) / 5}{(1 - 0,997155) / 10} \\
 &= \frac{0,020248 / 5}{0,002845 / 10} \\
 &= 14,23407
 \end{aligned}$$

Lampiran 2: Hasil Estimasi Regresi dengan Metode Common

Dependent Variable: LPDRB?				
Method: GLS (Cross Section Weights)				
Date: 11/05/07 Time: 04:12				
Sample: 2001 2005				
Included observations: 5				
Number of cross-sections used: 6				
Total panel (balanced) observations: 30				
White Heteroskedasticity-Consistent Standard Errors & Covariance				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-453743.3	115328.7	-3.934349	0.0006
LPAD?	0.024448	0.006957	3.513875	0.0017
LDBH?	0.168945	0.005752	29.37208	0.0000
LDAU?	0.001609	0.000338	4.757143	0.0001
LTK?	0.267867	0.240972	1.111612	0.2769
Weighted Statistics				
R-squared	0.976907	Mean dependent var		14105282
Adjusted R-squared	0.973212	S.D. dependent var		16332793
S.E. of regression	2673179.	Sum squared resid		1.79E+14
F-statistic	264.3967	Durbin-Watson stat		1.937469
Prob(F-statistic)	0.000000			
Unweighted Statistics				
R-squared	0.221585	Mean dependent var		3021136.
Adjusted R-squared	0.097038	S.D. dependent var		2824619.
S.E. of regression	2684075.	Sum squared resid		1.80E+14
Durbin-Watson stat	1.561259			

Lampiran 3:

Hasil Estimasi Regresi dengan Metode Fixed Effects

Dependent Variable: LPDRB?				
Method: GLS (Cross Section Weights)				
Date: 11/03/07 Time: 14:01				
Sample: 2001 2005				
Included observations: 5				
Number of cross-sections used: 6				
Total panel (balanced) observations: 30				
White Heteroskedasticity-Consistent Standard Errors & Covariance				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
LPAD?	0.007323	0.000158	46.29695	0.0000
LDBH?	0.164632	0.001126	146.2157	0.0000
LDAU?	-0.001289	0.000116	-11.13470	0.0000
LTK	0.766495	0.007289	105.1620	0.0000
Fixed Effects				
GROBOGAN--C	2753687.			
DEMAK--C	218999.7			
SEMARANG--C	27569.48			
KENDAL--C	1121296.			
KSALATIGA--C	225563.0			
KSEMARANG--C	128562.8			
Weighted Statistics				
R-squared	0.997155	Mean dependent var		26727201
Adjusted R-squared	0.995874	S.D. dependent var		41563851
S.E. of regression	2669702.	Sum squared resid		1.43E+14
F-statistic	2336.389	Durbin-Watson stat		2.100169
Prob(F-statistic)	0.000000			
Unweighted Statistics				
R-squared	0.306306	Mean dependent var		3021136.
Adjusted R-squared	-0.005856	S.D. dependent var		2824619.
S.E. of regression	2832878.	Sum squared resid		1.61E+14
Durbin-Watson stat	1.717930			

Lampiran 4: Hasil Estimasi Regresi dengan Metode Random Effects

Dependent Variable: LPDRB?				
Method: GLS (Variance Components)				
Date: 11/05/07 Time: 04:06				
Sample: 2001 2005				
Included observations: 5				
Number of cross-sections used: 6				
Total panel (balanced) observations: 30				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-3478773.	2047546.	-1.698996	0.1017
LPAD?	0.240673	0.087217	2.759471	0.0107
LDBH?	0.158451	0.133247	1.189154	0.2456
LDAU?	-0.002340	0.013597	-0.172131	0.8647
LTK?	2.118648	4.544728	0.466177	0.6451
Random Effects				
GROBOGAN--C	-1500670.			
DEMAK--C	937317.6			
SEMARANG--C	1096.072			
KENDAL--C	-40640.79			
KSALATIGA--C	118607.8			
KSEMARANG--C	484289.2			
GLS Transformed Regression				
R-squared	0.354854	Mean dependent var		3021136.
Adjusted R-squared	0.251630	S.D. dependent var		2824619.
S.E. of regression	2443532.	Sum squared resid		1.49E+14
Durbin-Watson stat	2.434379			
Unweighted Statistics including Random Effects				
R-squared	0.234306	Mean dependent var		3021136.
Adjusted R-squared	0.111795	S.D. dependent var		2824619.
S.E. of regression	2662052.	Sum squared resid		1.77E+14
Durbin-Watson stat	2.051121			

CURRICULUM VITAE

1. IDENTITAS

1.	Nama	Amin Pujiati, SE.M.Si
2.	NIP	132320654
3.	Tempat / Tgl. Lahir	Kudus, 21 Agustus 1969
4.	Alamat Rumah Telepon E-mail	Jl. Lamongan Barat III/ 38 Semarang (024) 8501448 , HP. 08156622997 apuji06@yahoo.co.id
5.	Alamat Kantor Telepon /Fax	Gedung C6 Fakultas Ekonomi, Kampus , UNNES Sekaran Gunungpati (024) 70778922 / (024) 8508015
6.	Agama	Islam

2. PENDIDIKAN

No	Universitas/Isntitut dan Lokasi	Gelar/ Jenjang	Tahun Selesai	Bidang Studi
1.	Universitas Diponegoro Semarang	S.E / S1	1992	Ekonomi Pembangunan
2.	Universitas Gadjah Mada Yogyakarta	M.Si / S2	2004	Ekonomi Pembangunan

3. PENGALAMAN KERJA 5 TAHUN TERAKHIR

1.	Tahun 1994 - 2006	Dosen Tetap STIE Stikubank Semarang
2.	Tahun 2006 - Sekarang	Dosen Tetap Fakultas Ekonomi UNNES

4. PENELITIAN DAN KARYA ILMIAH 5 TAHUN TERAKHIR

No	Penelitian / Karya Ilmiah	Tahun
1.	Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Nilai Tukar Rupiah Terhadap Dollar Amerika Serikat (Model Dornbusch Sticky Price)	2003
2.	Pertumbuhan Industri Manufaktur Besar dan Menengah Kabupaten/ Kota di Jawa Tengah Tahun 1993 – 2002	2004
3.	Analisis Spasial Industri Manufaktur Besar dan Menengah di Jawa Tengah	2005
4.	Pengaruh Knowledge Spillover Terhadap Pertumbuhan dan Kinerja Industri Di Jawa Tengah	2006
5.	Identifikasi Konsentrasi Spasial Dan Spesialisasi Industri Dalam Rangka Peningkatan Daya Saing Daerah (Studi Kasus Di Kabupaten / Kota di Jawa Tengah)	2007
6.	Analisis Penetapan Kawasan Andalan Sebagai Pusat Pertumbuhan dan Penggerak perekonomian Wilayah di Jawa Tengah	2007
7.	Etos Kerja Wanita Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga 2007	2007
8.	Penerapan Monetary Model Dalam Menganalisis Fluktuasi Nilai Tukar Rupiah Terhadap Dollar Amerika Serikat	2008
9.	Analisis Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Jumlah Uang Beredar di	2008

	Indonesia	
10.	Disparitas dan Spesialisasi Industri Manufaktur Kabupaten / Kota di Jawa Tengah	2008
11.	Pengujian Hipotesis Eksternalitas Dinamis MAR (Marshall, Arrow, Romer) Porter dan Jacobs terhadap Pertumbuhan Industri di Kawasan Industri Jawa Tengah	2008
	Penulisan Buku / Jurnal	
1.	Sustainable Development : Teori dan Implementasinya , <i>Majalah Ilmiah Fokus Ekonomi</i> , Vol.2, No.3,	2003
2.	Inter Firm Linkage : Teori dan Penerapannya di Indonesia, <i>Majalah Ilmiah Fokus Ekonomi</i> , Vol.2, No.2	2003
3.	Konsep Local Economic Development : Masih Relevansikah di Era Otonomi Daerah ?, <i>Fokus Ekonomi</i> , Vol.4, No.1	2005
4.	Dinamika Industri Manufaktur Besar dan Menengah di Jawa Tengah, <i>Jurnal Bisnis dan Ekonomi</i> , Vol. 12, No.2,	2005
5.	Analisis Pertumbuhan Industri di Jawa Tengah dengan <i>Metode Generalized Least Square (GLS)</i> , <i>Telaah Manajemen</i> , Vol.2, Edisi.2,	2005
6.	Kapita Selekta Ekonomika, Modul Pra MM STIE Stikubank, 2005	2005

5. PENGABDIAN MASYARAKAT 5 TAHUN TERAKHIR

No	Pengabdian Masyarakat	Tahun
1.	Pemberdayaan Usaha Kecil Melalui Program Keterkaitan Di Kelurahan Purwosari Kecamatan Kota Kabupaten Kudus	2005
2.	Sosialisasi Peraturan Menteri Dalam Negeri No.13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah di Kecamatan Gunungpati Semarang	2007
3.	Pembinaan Mentalitas dan Penanaman Jiwa Kewirausahaan bagi Masyarakat Pengemis di Desa Batu dan Gorawe Kecamatan Karangtengah Kabupaten Demak	2008
4.	Meningkatkan Kemampuan guru dalam Menyusun Penelitian Tindakan Kelas (PTK) di SMK PGRI 01 Semarang	2008